

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi merupakan aspek yang penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, karena partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan atas kesadaran dan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Bagi masyarakat Barat sebelum abad ke-18, partisipasi merupakan barang asing. Pemberian hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu demokratis baru dimulai awal abad ke-20. Bahkan di Swiss, hak perempuan baru diakui beberapa dasawarsa lalu. Di Amerika Serikat, keterlibatan orang-orang hitam (Negro) dalam politik juga belum lama. Dibeberapa Negara Timur Tengah masih dijumpai adanya pembatasan terhadap kaum perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik (peran politik).¹

Meski disadari bahwa ada perbedaan-perbedaan kodrati makhluk perempuan dan laki-laki secara jenis kelamin dan konstruksi tubuh, namun dalam konteks budaya peran yang diembannya haruslah memiliki kesetaraan. Hingga saat ini masih ditenggarai terjadi ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, yang sebenarnya lebih didasarkan pada kelaziman budaya setempat. Terkait dalam kehidupan keseharian, konstruksi budaya memiliki kontribusi yang

¹ Handoyo, 2013, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: Ombak, h.248

kuat dalam memposisikan peran laki-laki dan perempuan. Bayaknya ketidaksetaraan ini pada akhirnya memunculkan gerakan feminis yang menggugat dominasi laki-laki atas perempuan.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial budaya telah merugikan perempuan seperti melahirkan pembagian kerja yang tidak seimbang, perempuan mempunyai beban kerja lebih berat apabila harus bekerja mencari nafkah. Subordinasi terhadap perempuan dengan anggapan perempuan memiliki kualitas rendah telah merugikan perempuan sehingga perempuan didorong untuk bertanggungjawab pada tugas rumah tangga. Kegiatan rumah tangga tidak menghasilkan upah dan kegiatan tersebut identik dengan perempuan bahkan selayaknya menjadi kewajiban dan tanggungjawab perempuan. Kenyataan bahwa perempuan harus bertanggungjawab atas seluruh beban kerja di rumah tangga meskipun perempuan mampu memberikan sumbangan pendapatan dari pekerjaan luar rumah tangga. Jadi status dan peran laki-laki dan perempuan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang disebabkan oleh perbedaan norma sosial dan nilai sosial budaya.

Pada masa industrialisasi kehidupan masyarakat sudah semakin kompleks, terdapat pembagian kerja dan pengotakan fungsional bidang-bidang kehidupan.² Struktur yang sedang dibangun adalah pembagian kerja antar lapisan kelompok. Kelompok buruh akan terus dipertahankan karena memberi keuntungan kepada pemilik modal. Kelompok kelas bawah terus berada pada lingkaran sosial yang distabilkan oleh politik, sebab kelompok kelas bawah menyimpan cadangan

² Soekanto, 2012, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers, h.325

individu yang dapat digunakan sebagai pengisi ruang dari kekosongan pembagian kerja.

Masyarakat yang berada di kawasan industri baik yang bekerja bidang industri, maupun yang ada didekat kawasan tersebut mempunyai tingkat rutinitas yang berbeda dengan masyarakat agraris. Perubahan itu terjadi pada berbagai aspek yang saling berhubungan pada kehidupan masyarakat. Kondisi masyarakat industri memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, hal itu dapat dilihat dengan beroperasinya pabrik 24 jam. Keadaan ini sesuai dengan buruh perempuan di Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi khususnya.

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif dalam hal apapun, baik itu dalam peran pendidikan, sosial, budaya, bahkan politik. Hanya saja selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender. Sehingga dibutuhkanlah perjuangan keras dan keseluruhan dan segenap perempuan dalam segala ini. Terlebih dalam persoalan politik karena sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.

Letak geografis Desa Linggar Kecamatan Rancaekek dekat dengan industri PT. Kahatex, sehingga banyak perempuan di Desa Linggar yang memilih profesi sebagai buruh di PT. Kahatex tersebut. Buruh perempuan PT. Kahatex di Desa Linggar memang mempunyai kesibukan tersendiri dalam kesehariannya karena mereka memiliki peran yang ganda, pada satu sisi mereka berperan sebagai buruh industri dan pada sisi yang lain mereka berperan sebagai ibu rumah tangga.

Apabila melihat dari data tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Linggar, peran ganda yang dialami oleh buruh perempuan PT. Kahatex di Desa Linggar tidak menjadi alasan untuk tetap ikut berpartisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Data tabel tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Linggar, sebagai berikut:

Tabel: 1.1

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Linggar

Jenis Pemilu	Yang Memiliki Hak Pilih		Yang Memanfaatkan Hak Pilih	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pemilihan Bupati	3.697	4.241	2091	2152

Sumber Data: Profil Desa Linggar Tahun 2016

Berdasarkan tabel tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Linggar Pemilihan Bupati bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Linggar cukup tinggi. Padahal mayoritas perempuan berprofesi sebagai buruh pabrik industri yang memiliki waktu relatif sibuk untuk bekerja di pabrik dan mengurus rumah tangga.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk

memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Letak geografis Desa Linggar yang strategis dan termasuk dalam kawasan industri mengakibatkan perubahan pada tatanan kehidupan sosial dan politik masyarakat, khususnya pada partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Partisipasi Politik Buruh Perempuan (Studi Deskriptif Buruh Perempuan PT. Kahatex dalam Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2015 di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek).**

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peran ganda yang dimiliki oleh buruh perempuan PT.Kahatex di Desa Linggar menjadikan mereka memiliki manajemen waktu yang sibuk, disatu sisi mereka harus bekerja sebagai buruh dan pada sisi yang lain mereka berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran ganda yang dimiliki mereka tidak menjadi alasan untuk tetap ikut berpartisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Tahun 2015.
2. Mayoritas buruh perempuan PT. Kahatex di Desa Linggar menjadi anggota di organisasi buruh seperti organisasi PEPSI (Persatuan Pekerja Seluruh Indonesia) dan PPB (Persatuan Perjuangan Buruh).

³Juliansyah, 2007, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, h.21

3. Apabila buruh perempuan PT. Kahatex memiliki waktu luang, mereka suka mendengarkan berita-berita politik di televisi.
4. Adanya faktor pendorong buruh perempuan PT. Kahatex di Desa Linggar yaitu suami mereka dan pihak industri yang suka memberi mereka izin untuk tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pilkada.

1.3. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2015 di Desa Linggar?
2. Apa bentuk partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2015 di Desa Linggar?
3. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat buruh perempuan PT. Kahatex sehingga terlibat dalam mengikuti partisipasi politik di Desa Linggar?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Panitia Pilkada (PPK, PPS, dan KPPS) untuk meningkatkan minat partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Bandung di Desa Linggar?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2015 di Desa Linggar.
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Bandung di Desa Linggar.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat buruh perempuan PT. Kahatex dalam mengikuti partisipasi politik Desa Linggar.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Panitia Pilkada (PPK, PPS, dan KPPS) untuk meningkatkan minat partisipasi politik buruh perempuan PT. Kahatex dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Bandung di Desa Linggar.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Sosiologi khususnya yang berkaitan dengan Sosiologi Politik tentang partisipasi politik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi kebijakan yang akan diambil Pemerintah Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.
- b. Kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya, sebagai acuan referensi untuk bahan penelitian mengenai partisipasi politik buruh perempuan, setidaknya ada gambaran melalui hasil penelitian yang dibuat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participate*" yang artinya mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian.⁴ Banyak ahli juga memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi mengenai konsep partisipasi. Apabila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.⁵

Menurut Soegarda Poebakawatja, partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan didalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.⁶

Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-

⁴Wijaya, 2004, *Komunikasi Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, h.208

⁵Echols dan Hasan, 2000, *Agama dan Partisipasi Publik*, Jakarta: Republika, h.419

⁶Poerbakawatja, 1981, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka, h.251

pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan kesadaran dan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.⁷

Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.⁸

Menurut Huntington dan Nelson ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum. *Pertama*, partisipasi otonom. *Kedua*, partisipasi mobilisasi.⁹ Karena partisipasi politik memiliki sifat spektrum, justifikasi bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan adalah tidak benar. Pengertian yang tepat dalam konteks tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila diberi otonomi secara luas. Ini artinya partisipasi otonom bisa berbalik secara drastis menuju partisipasi yang dimobilisasi. Begitupula, apabila peta politik berubah.¹⁰

Surbakti mengatakan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.¹¹ Partisipasi aktif apabila merujuk pada Roth dan Wilson bisa diilustrasikan sebagai tiga kelompok (pengamat, partisipan, dan

⁷ Maran, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, h.147

⁸Huntington dan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 5

⁹ Soetrisno, 1992, *Menuju Masyarakat Partisipasi*, Jakarta: Kanisus, h.207

¹⁰Mufti, 2012, *Teori-teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia., h.

¹¹Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, h.142

aktivis). Sedangkan partisipasi pasif adalah orang-orang yang apolitik, atau dalam bahasa Ramlan Surbakti adalah kegiatan atau tindakan masyarakat yang mentaati, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.¹²

Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Dari masalah-masalah yang dijelaskan di atas sehingga dapat dibuat gambaran mengenai kerangka pemikiran, sebagai berikut:

¹²Basrowi, 2012, *Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia: Bogor, h.72

¹³Juliansyah, 2007, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, h. 21.

Skema Konseptual

Tabel 1.2

